

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) di Pesurungan Kota Tegal

Maulida Fitri¹, Aditya Agung Nugraha², M. Taufiq Abadi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: pipitmaulidafitri@gmail.com¹, adityaagung@gmail.com²,

m.taufiqabadi@gmail.com³

Abstract : *The COVID-19 pandemic has caused the order of life to become disorganized. Starting from the aspect of health, security to the financial condition of the community. Not a few people who find it very difficult to earn income in conditions where all activities are under strict restrictions. As a form of government concern for the financially underprivileged, there are actually many kinds, such as: providing various forms of social assistance, such as the Family Hope Program (PKH), Cash Social Assistance (BST), Village Cash Direct Assistance (BLTD), Program Worker Card, and so on. However, during the Covid-19 outbreak, the government provided financial relief for the affected community, namely the Village Cash Direct Assistance (BLTD). This study aims to find out how the government's efforts in distributing Village Cash Direct Assistance funds, to find out what the benefits are for the community, and how other policies are related to this Village Cash Direct Assistance (BLTD). The method used in this research is to apply a descriptive qualitative approach and data collection is carried out through interviews with the right sources. The results showed that the people who received the Village Cash Direct Assistance were helped financially, but after doing the research it turned out that not a few people felt dependent on assistance from the government. In addition, for the distribution of funds that are not on target, and the funds are not used properly, the government takes firm action to follow up on the situation by slowly reducing the amount of funds received by the public per month. In fact, this form of government concern is appropriate, and people should use these funds as well as possible.*

ABSTRAK : *Pandemi covid-19 mengakibatkan tatanan kehidupan menjadi tidak teratur. Mulai dari segi kesehatan, keamanan hingga kondisi finansial masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang sulit sekali memperoleh penghasilan di kondisi dimana semua aktivitas dalam pembatasan yang ketat. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu secara finansial sebetulnya banyak sekali macam nya, seperti : memberikan berbagai macam bentuk bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD), Program Kartu Pekerja, dan sebagainya. Namun selama terjadi covid-19 pemerintah meringankan finansial masyarakat yang terdampak yakni Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai Desa, untuk mengetahui apa manfaatnya bagi masyarakat, serta bagaimana kebijakan-kebijakan lainnya terkait Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Desa ini terbantu kondisi finansialnya, akan tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata tidak sedikit masyarakat yang merasa ketergantungan akan adanya bantuan dari pemerintah. Selain itu, bagi penyaluran dana yang tidak tepat sasaran, dan dana tidak digunakan sebagaimana semestinya, maka pemerintah melakukan tindakan secara tegas untuk menindaklanjuti situasi tersebut secara perlahan mengurangi jumlah dana yang diterima masyarakat perbulannya. Sebetulnya bentuk kepedulian pemerintah seperti ini sudah tepat, dan sudah seharusnya masyarakat menggunakan dana ini dengan sebaik-baiknya.*

Kata Kunci : *Bantuan Sosial, Bantuan Langsung Tunai, Pemerintah, Ekonomi*

1. PENDAHULUAN

Negara China pada bulan Desember 2019 mengumumkan telah adanya penyakit yang tidak teridentifikasi sebelumnya pada salah satu warganya yang dimana warga tersebut diketahui memiliki pekerjaan memperjualbelikan binatang liar serta mempunyai jalur untuk memasuki area pasar ikan Huanan yang diketahui pasar tersebut sebagai tempat penularan pertama karena tempat pasar tersebut berdekatan dengan laboratorium Wuhan yang pada saat itu terjadi kecerobohan ilmuwan karena pelepasan patogen yang membahayakan sehingga penyakit tersebut berasal dari spesies virus lain yang menempel pada tubuh kelelawar hingga akhirnya menular ke tubuh manusia.

Pemerintah Indonesia mengumumkan terjadinya penularan pertama kali pada Februari 2020 yang terjadi pada Wanita berumur 31 tahun dan ibu berumur 64 tahun. Diketahui 2 orang tersebut merupakan warga Jepang yang pada saat itu sedang berkunjung di Indonesia. Saat itu 2 wanita tersebut bertemu saat mengikuti acara club dansa berlokasi di Jakarta. Karena penularannya sangat cepat dalam waktu 3-5 hari, oleh karena itu penyebaran ini tidak mudah untuk ditekan tingkat penularannya.

Kondisi suram ini membuat banyak kalangan masyarakat mau tidak mau harus mengikuti aturan pemerintah yang ditujukan guna menekan tingkat penularan. Tidak sedikit dari kalangan pemuka agama, pekerja, pengusaha, media, mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perkumpulan dengan banyak orang sehingga banyak sekali perusahaan yang mau tidak mau harus ditutup untuk sementara waktu. Dari kegiatan penutupan perusahaan tersebut akhirnya banyak pekerja yang tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja yakni gaji dikarenakan toko tidak memiliki penghasilan. Tidak sedikit pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan tempat dimana mereka bekerja.

Kondisi seperti ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah supaya mereka mampu menghidupi kehidupannya yang sangat tercekam tidak mampu bergerak secara leluasa. Atas keluhan-keluhan yang terjadi pada kalangan warganya, pemerintah menampung dan mencoba untuk merealisasikan bantuan tersebut melalui bantuan Tunai Langsung Desa (BLTD).

2. TINJAUAN PUSTAKA KAJIAN TEORI

1. Penyakit menular merupakan penyakit yang diakibatkan dari mikroba penyakit khusus ataupun produk toxin yang diperoleh dari penyebaran mikroba penyakit khusus ataupun produk toxin yang dihasilkan dari mikroba penyakit khusus tersebut yang berasal dari orang yang tertular, dari hewan pada orang yang sensitif. Penularan tersebut terjadi dari orang yang sudah tertular kepada orang yang belum tertular penyakit menular tersebut yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung penyebarannya.
2. Bantuan sosial merupakan bantuan yang disalurkan dari pemangku kebijakan terhadap masyarakat sekitar yang memerlukan bantuan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama di bidang primer.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti mengaplikasikan pendekatan kualitatif. Bagman dan Taylor mengartikan metodologi kualitatif merupakan sebuah tatacara penelitian yang membentuk data uraian seperti kata-kata tertulis atau lisan dari subjek sasaran maupun karakter yang menjadi pusat penelitian (Suparmo, 2017).

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian maupun partisipan penelitian dengan cara mengolah kembali data yang diperoleh melalui pengamatan, serta observasi.

Sementara untuk pengumpulan data, peneliti memakai dua jenis cara diantaranya :

a. Pengamatan

Suatu upaya penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui cara mengamati kondisi lapangan penelitian dimana hasil pengamatan tersebut peneliti akan memperoleh keterangan dari suatu kejadian yang sedang terjadi.

b. Interview

Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti bersama narasumber mengenai suatu fenomena dengan cara tanya jawab yang nantinya hasil tersebut diolah kembali menjadi kesimpulan keterangan yang bersifat factual, actual serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan Ketentuan dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD)

Demi mewujudkan penyaluran dana yang tepat tentunya aparat pemerintah membuat kebijakan-kebijakan tertentu supaya program ini terlaksana sesuai dengan rencana awal.

Bahwasannya, Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) ini ditujukan untuk masyarakat sekitar kurang mampu yang terdampak covid-19. Diharapkan masyarakat ini mampu memenuhi kebutuhan hidupnya selama pandemi covid-19 berlangsung. Akan tetapi sebenarnya Bantuan Langsung Tunai Desa sudah dijalankan sebelum adanya pandemi. Namun berhubung terjadinya covid-19 yang banyak membuat perekonomian masyarakat menurun drastis maka pemerintah desa kembali menggalakkan program ini.

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) ini mampu diajukan oleh masyarakat kurang mampu yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS). Pendataan ini dilakukan oleh kepala desa yang nantinya akan di ajukan ke Dinas Sosial lalu dilakukan survei oleh kader-kader Dinas Sosial atas persetujuan kepala desa terkait kepada masyarakat yang mendaftarkan diri. Pengajuan ini hanya dapat diajukan dalam satu Kartu Keluarga. Setelah melakukan pengajuan diri, lalu akan dilakukan seleksi dokumen pengajuan. Jika data sesuai dengan persyaratan maka akan dilakukan proses lanjutan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Jumlah dana yang disalurkan dibagi sama rata, tidak ada perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain yakni sebanyak Rp. 600.000,- per 3 bulan.

Tidak perlu khawatir jika terdapat masyarakat yang kurang mampu untuk melakukan pendaftaran mandiri, karena tentunya pihak kepala desa sudah mempunyai data-data warga yang berhak menerima bantuan tersebut. Sementara bagi warga yang tadinya mampu secara finansial akan tetapi akibat covid-19 ini menjadikan warga tersebut menjadi orang yang terbilang butuh untuk memperoleh bantuan jenis ini, tentunya warga tersebut harus mengajukan diri kepada pihak kepala desa supaya terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) jika data terbarunya sesuai dengan kriteria warga yang berhak menerima, maka warga ini pun nantinya akan memperoleh Bantuan Langsung Tunai Desa (DTKS) dengan jumlah nominal yang sama sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Tantangan dalam Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD)

Tantangan pertama bagi pemerintah desa saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) yakni menentukan sasaran warga yang tepat untuk menerima dana

ini. Bagaimana menumbuhkan pengertian kepada masyarakat bahwa dana ini ditujukan bagi warga kurang mampu yang terdampak covid-19. Bagi warga yang sekiranya masih mampu untuk memenuhi kehidupannya, dihimbau untuk tidak mendaftarkan diri supaya warga yang lebih membutuhkan bantuan ini dapat terbantu dengan segera.

Tantangan kedua yakni terkait pemanfaatan dana bantuan yang tidak sesuai dengan program pemerintah. Dalam lapangan, ada yang menggunakan dana ini untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti membeli smartphone, kosmetik, dan sebagainya. Padahal sasaran penyaluran dana bantuan jenis ini bukan untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau mewah.

Tantangan Ketiga yakni menumbuhkan pengertian masyarakat untuk tidak memiliki kebiasaan atau pengharapan berlebih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah sehingga masyarakat menjadi kurang giat dalam mencari nafkah secara mandiri.

Tantangan Keempat yakni bagaimana pemerintah mengendalikan antusias masyarakat yang selalu mengharapkan dana tersebut diperoleh secara cepat. Dalam hal ini sebenarnya sudah terdapat aturan tetap yang mengatur terkait waktu pencairan.

Dampak Adanya Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD)

Pemerintah cukup efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi selama covid-19. Banyak warga yang terbantu oleh bantuan ini, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti untuk memenuhi kebutuhan primernya seperti makan dan terpenuhinya dana kesehatan. Selain itu terdapat warga yang dapat memanfaatkan dana tersebut dijadikan modal untuk membuka usaha kecil-kecilan sehingga dana tersebut menjadi berkembang. Namun terdapat pula dampak negatif dari adanya bantuan ini, seperti warga menjadi sangat bergantung kepada bantuan pemerintah. Tidak sedikit dari mereka yang tidak perlu melakukan usaha lebih mengingat kehidupan dirinya sudah dijamin oleh pemerintah.

4. SIMPULAN

Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) yang dilakukan oleh kepala desa Pesurungan Kota Tegal ini sudah cukup berjalan dengan efektif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi selama covid-19 bagi warganya yang terdampak. Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) hanya ditujukan untuk warga miskin, bukan warga yang memiliki kondisi keluarga yang sakit. Dalam proses penyalurannya, terdapat banyak sekali tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Akan tetapi hal itu tidak menjadikan pemerintah desa menurunkan kepeduliannya untuk membantu warganya. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk mampu memanfaatkan dana bantuan ini guna memprioritaskan kebutuhan primer terlebih dahulu.

Saran

Setelah dilakukannya penelitian ini, dari kesimpulan yang diperoleh maka peneliti dapat memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan perbaikan-perbaikan bagi pemerintah desa di Pesurungan Kota Tegal, diantaranya :

1. Kepala desa hendaknya melakukan sosialisasi terkait Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) ini supaya masyarakat dapat memahami dengan baik terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku.
2. Disarankan kepada pihak pemerintah desa supaya melakukan tindakan yang tegas terhadap penyalahgunaan atas pemanfaatan dana yang dilakukan masyarakatnya.

3. Pemerintah desa sebaiknya melakukan komunikasi proaktif terkait jatuh tempo pencairan dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) secara berkala.
4. Pemerintah desa disarankan untuk melakukan sistem pengecekan data terbaru (Rusydi, 2012) bagi masyarakat yang berhak menerima serta memberhentikan data masyarakat yang sudah tidak berhak menerima dana bantuan ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aji Dwi Utomo, D. T. (2020). Peran Serta Program Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Untuk Perbaikan Ekonomi di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. *Jurnal Dinamika Sosial*, 1-9.
- Andi Ashar, A. A. (2020). Dampak Sosial Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. *Jurnal Sosialisasi*, 7, 19-25.
- Edo Pramana Putra, Y. L. (2015). Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal di Indonesia. *Tata Loka*, 161-171.
- HARININGSIH, I. S. (n.d.). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Di Era Pandemi (Studi Kasus Di Kecamatan Genteng Kota Surabaya). *Respository UNTAG*.
- Muhammad Abdianor Nasrullah, R. A. (2021). analisis bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat tanah laut pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 4, 95-101.
- Muhammad Atha' Iqbal, L. N. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa Kepada Masyarakat di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Lombok Timur. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 16-27.
- Retnaningsih, H. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11, 215-227.
- Rizka Yunika Ramly, R. Y. (2021). Analisis Sistem Penyaluran Dana Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Gorontalo. *YUME : Journal of Management*, IV, 157-164.
- Rusydi, H. M. (2012). Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Takalar. *JEB Jurnal Ekonomi Balance*, 8, 152-176.
- Zaki Al Mubarak, S. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 (Studi pada Desa Pendarungan Kecamatan Kabat). *SOSMANIORA*, 1, 97-101.
- Zega, Y. A. (2022). Efektivitas Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19 di Desa Ombolata Ulu Kecamatan Gunungsitoli. *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)*, 1-10.